



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SUB UNIT KERJA : LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGONDO**
2. Jabatan : **KEPALA LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
3. NHK : **212061**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 230.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/72 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 127.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, WARISAN Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, ISUZU MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 48.345.329**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 411.345.329**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 411.345.329

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.